



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Untuk daerah Provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2);
- b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten/kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke- 13 (ketiga belas), dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp225.532.824.825.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Rincian alokasi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 untuk daerah kabupaten/kota diperhitungkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011.
- (4) Perhitungan koreksi terhadap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Untuk daerah Provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2);
- b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten/kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke- 13 (ketiga belas), dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp225.532.824.825.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Rincian alokasi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 untuk daerah kabupaten/kota diperhitungkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011.
- (4) Perhitungan koreksi terhadap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TANGGAL 7 FEBRUARI 2011

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

(rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	716.646.172.000
2	Kab. Aceh Barat	367.377.754.000
3	Kab. Aceh Besar	452.068.799.000
4	Kab. Aceh Selatan	389.001.539.000
5	Kab. Aceh Singkil	257.048.215.000
6	Kab. Aceh Tengah	388.865.291.000
7	Kab. Aceh Tenggara	345.178.284.000
8	Kab. Aceh Timur	441.119.241.000
9	Kab. Aceh Utara	440.366.137.000
10	Kab. Bireun	480.010.589.000
11	Kab. Pidie	487.385.829.000
12	Kab. Simeulue	260.339.629.000
13	Kota Banda Aceh	406.687.627.000
14	Kota Sabang	241.868.681.000
15	Kota Langsa	276.505.469.000
16	Kota Lhokseumawe	315.418.871.000
17	Kab. Nagan Raya	331.232.473.000
18	Kab. Aceh Jaya	255.517.560.000
19	Kab. Aceh Barat Daya	275.720.082.000
20	Kab. Gayo Lues	291.310.455.000
21	Kab. Aceh Tamiang	306.322.187.000
22	Kab. Bener Meriah	285.611.088.000
23	Kota Subulussalam	185.847.725.000
24	Kab. Pidie Jaya	255.713.281.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
25	Provinsi Sumatera Utara	948.867.504.000
26	Kab. Asahan	523.902.037.000
27	Kab. Dairi	374.323.886.000
28	Kab. Deli Serdang	889.009.680.000
29	Kab. Tanah Karo	441.830.815.000
30	Kab. Labuhan Batu	370.860.918.000
31	Kab. Langkat	689.304.684.000
32	Kab. Mandailing Natal	455.686.638.000
33	Kab. Nias	250.935.711.000
34	Kab. Simalungun	696.561.265.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	376.142.335.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	343.959.059.000
37	Kab. Tapanuli Utara	408.808.812.000
38	Kab. Toba Samosir	310.465.195.000
39	Kota Binjai	336.975.734.000
40	Kota Medan	899.927.416.000
41	Kota Pematang Siantar	352.723.110.000
42	Kota Sibolga	248.596.013.000
43	Kota Tanjung Balai	275.733.192.000
44	Kota Tebing Tinggi	262.130.545.000
45	Kota Padang Sidempuan	308.201.364.000
46	Kab. Pakpak Bharat	198.404.616.000
47	Kab. Nias Selatan	319.188.994.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	313.663.208.000
49	Kab. Serdang Bedagai	458.449.769.000
50	Kab. Samosir	283.201.579.000
51	Kab. Batu Bara	386.180.939.000
52	Kab. Labuhan Batu Utara	346.964.406.000
53	Kab. Labuhan Batu Selatan	267.177.153.000
54	Kab. Padang Lawas Utara	262.768.244.000

55 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	DAERAH	JUMLAH
55	Kab. Padang Lawas	249.724.117.000
56	Kota Gunung Sitoli	251.781.376.000
57	Kab. Nias Utara	231.858.197.000
58	Kab. Nias Barat	193.665.081.000
59	Provinsi Sumatera Barat	764.680.895.000
60	Kab. Limapuluh Kota	467.068.452.000
61	Kab. Agam	490.438.106.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	323.157.992.000
63	Kab. Padang Pariaman	464.663.502.000
64	Kab. Pasaman	363.189.348.000
65	Kab. Pesisir Selatan	514.412.081.000
66	Kab. Sijunjung	331.619.992.000
67	Kab. Solok	440.088.302.000
68	Kab. Tanah Datar	432.695.146.000
69	Kota Bukit Tinggi	273.043.100.000
70	Kota Padang Panjang	239.871.127.000
71	Kota Padang	711.730.929.000
72	Kota Payakumbuh	260.336.050.000
73	Kota Sawahlunto	225.291.340.000
74	Kota Solok	237.285.270.000
75	Kota Pariaman	263.078.322.000
76	Kab. Pasaman Barat	405.247.973.000
77	Kab. Dharmasraya	299.721.996.000
78	Kab. Solok Selatan	264.291.269.000
79	Provinsi Riau	380.051.123.500
80	Kab. Bengkalis	180.413.024.000
81	Kab. Indragiri Hilir	573.462.644.000
82	Kab. Indragiri Hulu	437.199.799.000

83 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
83	Kab. Kampar	440.702.230.500
84	Kab. Kuantan Singingi	431.274.589.000
85	Kab. Pelalawan	363.741.026.000
86	Kab. Rokan Hilir	186.049.029.000
87	Kab. Rokan Hulu	375.558.605.000
88	Kab. Siak	30.912.561.000
89	Kota Dumai	249.158.030.000
90	Kota Pekanbaru	488.849.555.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	240.293.822.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	395.745.542.000
93	Kab. Bintan	184.765.553.000
94	Kab. Natuna	71.909.237.000
95	Kab. Karimun	159.844.759.000
96	Kota Batam	316.771.074.000
97	Kota Tanjung Pinang	252.716.560.000
98	Kab. Lingga	200.941.641.000
99	Kab. Kepulauan Anambas	208.875.222.000
100	Provinsi Jambi	583.882.413.000
101	Kab. Batanghari	344.992.857.000
102	Kab. Bungo	379.423.832.000
103	Kab. Kerinci	369.273.971.000
104	Kab. Merangin	416.377.224.000
105	Kab. Muaro Jambi	371.192.309.000
106	Kab. Sarolangun	353.195.573.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	279.502.187.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	281.719.586.000
109	Kab. Tebo	325.192.490.000
110	Kota Jambi	441.744.239.000
111	Kota Sungai Penuh	257.773.767.000

112 Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	DAERAH	JUMLAH
112	Provinsi Sumatera Selatan	646.813.301.000
113	Kab. Lahat	425.542.398.000
114	Kab. Musi Banyuasin	294.984.624.000
115	Kab. Musi Rawas	467.449.542.000
116	Kab. Muara Enim	463.445.283.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	670.313.909.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	375.426.926.000
119	Kota Palembang	787.613.179.000
120	Kota Pagar Alam	230.466.235.000
121	Kota Lubuk Linggau	267.774.782.000
122	Kota Prabumulih	247.679.377.000
123	Kab. Banyuasin	539.461.721.000
124	Kab. Ogan Ilir	363.061.753.000
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	456.812.787.000
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	338.640.827.000
127	Kab. Empat Lawang	238.437.199.000
128	Provinsi Bangka Belitung	481.589.915.000
129	Kab. Bangka	325.189.354.000
130	Kab. Belitung	280.922.544.000
131	Kota Pangkal Pinang	277.489.696.000
132	Kab. Bangka Selatan	271.489.279.000
133	Kab. Bangka Tengah	235.398.938.000
134	Kab. Bangka Barat	265.457.548.000
135	Kab. Belitung Timur	261.911.574.000
136	Provinsi Bengkulu	607.388.036.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	322.484.482.000
138	Kab. Bengkulu Utara	374.568.556.000
139	Kab. Rejang Lebong	374.729.904.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	DAERAH	JUMLAH
140	Kota Bengkulu	397.878.445.000
141	Kab. Kaur	248.927.374.000
142	Kab. Seluma	287.335.154.000
143	Kab. Mukomuko	282.109.275.000
144	Kab. Lebong	241.212.067.000
145	Kab. Kepahiang	264.750.012.000
146	Kab. Bengkulu Tengah	250.160.597.000
147	Provinsi Lampung	769.973.038.000
148	Kab. Lampung Barat	402.798.910.000
149	Kab. Lampung Selatan	574.456.586.000
150	Kab. Lampung Tengah	785.179.586.000
151	Kab. Lampung Utara	562.565.682.000
152	Kab. Lampung Timur	637.844.599.000
153	Kab. Tanggamus	446.269.394.000
154	Kab. Tulang Bawang	400.393.837.000
155	Kab. Way Kanan	369.689.292.000
156	Kota Bandar Lampung	625.925.720.000
157	Kota Metro	271.643.686.000
158	Kab. Pesawaran	372.847.754.000
159	Kab. Pringsewu	368.274.778.000
160	Kab. Tulang Bawang Barat	284.455.823.000
161	Kab. Mesuji	258.173.317.000
162	Provinsi DKI Jakarta	209.909.442.000
163	Provinsi Jawa Barat	1.181.553.108.000
164	Kab. Bandung	1.203.323.247.000
165	Kab. Bekasi	680.732.734.000
166	Kab. Bogor	1.326.864.692.000
167	Kab. Ciamis	953.515.826.000

168 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	DAERAH	JUMLAH
168	Kab. Cianjur	966.045.246.000
169	Kab. Cirebon	930.584.969.000
170	Kab. Garut	1.141.265.938.000
171	Kab. Indramayu	822.083.501.000
172	Kab. Karawang	814.982.255.000
173	Kab. Kuningan	722.473.887.000
174	Kab. Majalengka	710.740.072.000
175	Kab. Purwakarta	517.617.234.000
176	Kab. Subang	746.157.315.000
177	Kab. Sukabumi	972.025.825.000
178	Kab. Sumedang	731.141.647.000
179	Kab. Tasikmalaya	881.979.959.000
180	Kota Bandung	1.005.982.541.000
181	Kota Bekasi	737.162.222.000
182	Kota Bogor	473.156.906.000
183	Kota Cirebon	412.007.037.000
184	Kota Depok	534.107.270.000
185	Kota Sukabumi	330.918.367.000
186	Kota Cimahi	354.972.241.000
187	Kota Tasikmalaya	476.326.683.000
188	Kota Banjar	236.029.904.000
189	Kab. Bandung Barat	662.914.939.000
190	Provinsi Banten	460.383.683.000
191	Kab. Lebak	661.498.928.000
192	Kab. Pandeglang	724.364.772.000
193	Kab. Serang	629.724.102.000
194	Kab. Tangerang	720.907.086.000
195	Kota Cilegon	315.682.508.000
196	Kota Tangerang	554.331.356.000

197 Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	DAERAH	JUMLAH
197	Kota Serang	365.936.818.000
198	Kota Tangerang Selatan	412.645.939.000
199	Provinsi Jawa Tengah	1.276.180.223.000
200	Kab. Banjarnegara	562.584.579.000
201	Kab. Banyumas	835.991.326.000
202	Kab. Batang	472.388.323.000
203	Kab. Blora	547.437.970.000
204	Kab. Boyolali	641.787.696.000
205	Kab. Brebes	800.671.665.000
206	Kab. Cilacap	877.475.472.000
207	Kab. Demak	544.790.064.000
208	Kab. Grobogan	669.380.099.000
209	Kab. Jepara	592.496.116.000
210	Kab. Karanganyar	577.830.087.000
211	Kab. Kebumen	732.339.067.000
212	Kab. Kendal	569.535.389.000
213	Kab. Klaten	793.638.525.000
214	Kab. Kudus	489.096.655.000
215	Kab. Magelang	669.259.369.000
216	Kab. Pati	692.522.880.000
217	Kab. Pekalongan	553.949.031.000
218	Kab. Pemasang	672.819.577.000
219	Kab. Purbalingga	522.204.299.000
220	Kab. Purworejo	586.119.442.000
221	Kab. Rembang	468.987.872.000
222	Kab. Semarang	568.138.051.000
223	Kab. Sragen	618.724.280.000
224	Kab. Sukoharjo	565.131.680.000
225	Kab. Tegal	704.172.500.000

226 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	DAERAH	JUMLAH
226	Kab. Temanggung	483.203.952.000
227	Kab. Wonogiri	682.359.252.000
228	Kab. Wonosobo	486.041.166.000
229	Kota Magelang	292.758.593.000
230	Kota Pekalongan	293.728.044.000
231	Kota Salatiga	262.810.281.000
232	Kota Semarang	715.959.967.000
233	Kota Surakarta	474.090.649.000
234	Kota Tegal	265.641.464.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	620.812.328.000
236	Kab. Bantul	625.352.685.000
237	Kab. Gunung Kidul	572.300.004.000
238	Kab. Kulon Progo	444.247.738.000
239	Kab. Sleman	632.180.583.000
240	Kota Yogyakarta	436.339.933.000
241	Provinsi Jawa Timur	1.347.501.699.000
242	Kab. Bangkalan	565.946.178.000
243	Kab. Banyuwangi	815.653.045.000
244	Kab. Blitar	698.002.036.000
245	Kab. Bojonegoro	665.539.925.000
246	Kab. Bondowoso	540.204.725.000
247	Kab. Gresik	561.391.041.000
248	Kab. Jember	1.059.232.324.000
249	Kab. Jombang	664.825.242.000
250	Kab. Kediri	750.629.267.000
251	Kab. Lamongan	680.161.848.000
252	Kab. Lumajang	606.140.873.000
253	Kab. Madiun	523.294.108.000

254 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
254	Kab. Magetan	546.569.392.000
255	Kab. Malang	1.049.561.624.000
256	Kab. Mojokerto	598.971.886.000
257	Kab. Nganjuk	669.916.556.000
258	Kab. Ngawi	654.720.280.000
259	Kab. Pacitan	480.825.305.000
260	Kab. Pamekasan	513.549.051.000
261	Kab. Pasuruan	714.589.608.000
262	Kab. Ponorogo	634.712.282.000
263	Kab. Probolinggo	639.206.544.000
264	Kab. Sampang	499.762.274.000
265	Kab. Sidoarjo	759.043.520.000
266	Kab. Situbondo	516.044.782.000
267	Kab. Sumenep	664.759.775.000
268	Kab. Trenggalek	535.503.337.000
269	Kab. Tuban	606.247.946.000
270	Kab. Tulungagung	724.035.454.000
271	Kota Blitar	250.235.761.000
272	Kota Kediri	399.397.630.000
273	Kota Madiun	297.863.919.000
274	Kota Malang	533.803.729.000
275	Kota Mojokerto	265.654.548.000
276	Kota Pasuruan	264.131.270.000
277	Kota Probolinggo	311.527.083.000
278	Kota Surabaya	679.450.127.000
279	Kota Batu	273.688.209.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	845.483.888.000
281	Kab. Bengkayang	340.823.512.000
282	Kab. Landak	403.595.524.000

283 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
283	Kab. Kapuas Hulu	602.042.118.000
284	Kab. Ketapang	671.248.725.000
285	Kab. Pontianak	350.258.317.000
286	Kab. Sambas	520.019.698.000
287	Kab. Sanggau	502.566.510.000
288	Kab. Sintang	553.592.817.000
289	Kota Pontianak	454.002.216.000
290	Kota Singkawang	309.388.293.000
291	Kab. Sekadau	288.662.775.000
292	Kab. Melawi	332.100.019.000
293	Kab. Kayong Utara	254.802.207.000
294	Kab. Kubu Raya	460.860.606.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	795.816.335.000
296	Kab. Barito Selatan	385.876.629.000
297	Kab. Barito Utara	360.139.008.000
298	Kab. Kapuas	573.018.632.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	424.143.349.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	532.373.196.000
301	Kota Palangkaraya	386.622.999.000
302	Kab. Barito Timur	310.768.377.000
303	Kab. Murung Raya	442.915.042.000
304	Kab. Pulang Pisau	339.419.142.000
305	Kab. Gunung Mas	360.320.621.000
306	Kab. Lamandau	286.233.306.000
307	Kab. Sukamara	283.491.180.000
308	Kab. Katingan	449.162.914.000
309	Kab. Seruyan	402.454.243.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	504.876.152.000
311	Kab. Banjar	429.561.238.000

312 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
312	Kab. Barito Kuala	351.563.383.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	324.451.416.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	322.545.858.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	284.013.888.000
316	Kab. Kotabaru	424.735.432.000
317	Kab. Tabalong	261.765.236.000
318	Kab. Tanah Laut	327.911.683.000
319	Kab. Tapin	284.609.398.000
320	Kota Banjarbaru	242.193.675.000
321	Kota Banjarmasin	444.635.637.000
322	Kab. Balangan	177.244.658.000
323	Kab. Tanah Bumbu	283.283.503.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	51.446.845.000
325	Kab. Berau	340.428.344.000
326	Kab. Bulungan	245.344.513.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	1.365.820.000
328	Kab. Kutai Barat	437.834.645.000
329	Kab. Kutai Timur	311.401.287.000
330	Kab. Malinau	519.080.393.000
331	Kab. Nunukan	228.628.551.000
332	Kab. Pasir	208.083.700.000
333	Kota Balikpapan	268.135.688.000
334	Kota Bontang	93.934.545.000
335	Kota Samarinda	397.674.573.000
336	Kota Tarakan	160.468.978.000
337	Kab. Penajam Paser Utara	118.428.287.000
338	Kab. Tana Tidung	149.598.558.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	619.711.007.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	320.510.271.000

341 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	DAERAH	JUMLAH
341	Kab. Minahasa	409.491.075.000
342	Kab. Sangihe	322.078.577.000
343	Kota Bitung	304.672.494.000
344	Kota Manado	482.454.131.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	278.873.014.000
346	Kab. Minahasa Selatan	331.072.211.000
347	Kota Tomohon	247.393.666.000
348	Kab. Minahasa Utara	307.575.485.000
349	Kota Kotamobagu	223.190.065.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Utara	228.524.673.000
351	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	256.257.512.000
352	Kab. Minahasa Tenggara	254.095.638.000
353	Kab. Bolaang Mongondow Timur	182.376.446.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	195.503.156.000
355	Provinsi Gorontalo	461.118.102.000
356	Kab. Boalemo	253.481.090.000
357	Kab. Gorontalo	382.676.841.000
358	Kota Gorontalo	296.633.489.000
359	Kab. Pohuwato	286.367.211.000
360	Kab. Bone Bolango	267.849.954.000
361	Kab. Gorontalo Utara	210.601.972.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	743.161.759.000
363	Kab. Banggai	504.385.617.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	323.960.072.000
365	Kab. Buol	330.193.207.000
366	Kab. Toli-Toli	352.284.608.000
367	Kab. Donggala	392.426.232.000
368	Kab. Morowali	438.589.730.000
369	Kab. Poso	434.150.162.000

370 Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	DAERAH	JUMLAH
370	Kota Palu	422.397.157.000
371	Kab. Parigi Moutong	447.907.500.000
372	Kab. Tojo Una Una	310.835.670.000
373	Kab. Sigi	383.717.155.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	816.757.969.000
375	Kab. Bantaeng	263.320.424.000
376	Kab. Barru	299.397.301.000
377	Kab. Bone	622.434.218.000
378	Kab. Bulukumba	431.348.855.000
379	Kab. Enrekang	302.521.276.000
380	Kab. Gowa	470.823.554.000
381	Kab. Jenepono	355.798.393.000
382	Kab. Luwu	396.991.281.000
383	Kab. Luwu Utara	377.853.294.000
384	Kab. Maros	358.603.014.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	385.783.049.000
386	Kab. Pinrang	420.189.733.000
387	Kab. Kepulauan Selayar	304.387.519.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	369.923.301.000
389	Kab. Sinjai	345.768.216.000
390	Kab. Soppeng	376.043.287.000
391	Kab. Takalar	334.734.972.000
392	Kab. Tana Toraja	322.960.734.000
393	Kab. Wajo	413.968.242.000
394	Kota Pare-pare	276.566.812.000
395	Kota Makassar	718.799.534.000
396	Kota Palopo	298.099.718.000
397	Kab. Luwu Timur	293.680.096.000
398	Kab. Toraja Utara	287.449.218.000

399 Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
399	Provinsi Sulawesi Barat	441.578.798.000
400	Kab. Majene	300.811.441.000
401	Kab. Mamuju	422.652.587.000
402	Kab. Polewali Mandar	400.635.194.000
403	Kab. Mamasa	290.163.285.000
404	Kab. Mamuju Utara	227.777.163.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	700.836.557.000
406	Kab. Buton	382.426.101.000
407	Kab. Konawe	473.778.515.000
408	Kab. Kolaka	450.584.108.000
409	Kab. Muna	425.648.391.000
410	Kota Kendari	399.702.724.000
411	Kota Bau-bau	317.920.877.000
412	Kab. Konawe Selatan	362.304.553.000
413	Kab. Bombana	282.286.386.000
414	Kab. Wakatobi	252.088.407.000
415	Kab. Kolaka Utara	273.275.706.000
416	Kab. Konawe Utara	289.562.449.000
417	Kab. Buton Utara	250.484.842.000
418	Provinsi Bali	560.673.539.000
419	Kab. Badung	156.926.247.000
420	Kab. Bangli	321.578.191.000
421	Kab. Buleleng	568.406.307.000
422	Kab. Gianyar	435.103.918.000
423	Kab. Jembrana	339.721.785.000
424	Kab. Karangasem	410.037.739.000
425	Kab. Klungkung	319.814.056.000
426	Kab. Tabanan	463.294.443.000

427 Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
427	Kota Denpasar	381.538.038.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	646.671.083.000
429	Kab. Bima	515.830.728.000
430	Kab. Dompu	340.657.285.000
431	Kab. Lombok Barat	466.594.063.000
432	Kab. Lombok Tengah	589.768.958.000
433	Kab. Lombok Timur	697.489.073.000
434	Kab. Sumbawa	496.158.922.000
435	Kota Mataram	367.095.372.000
436	Kota Bima	268.001.565.000
437	Kab. Sumbawa Barat	214.927.297.000
438	Kab. Lombok Utara	246.572.267.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	752.057.444.000
440	Kab. Alor	360.447.337.000
441	Kab. Belu	427.871.241.000
442	Kab. Ende	376.131.456.000
443	Kab. Flores Timur	372.359.575.000
444	Kab. Kupang	407.688.523.000
445	Kab. Lembata	263.583.846.000
446	Kab. Manggarai	319.679.873.000
447	Kab. Ngada	287.115.923.000
448	Kab. Sikka	362.434.160.000
449	Kab. Sumba Barat	238.492.879.000
450	Kab. Sumba Timur	385.899.303.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	459.454.363.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	334.409.729.000
453	Kota Kupang	377.792.563.000
454	Kab. Rote Ndao	236.407.490.000

455 Kab. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	DAERAH	JUMLAH
455	Kab. Manggarai Barat	287.008.667.000
456	Kab. Nagekeo	251.101.794.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	277.618.206.000
458	Kab. Sumba Tengah	207.842.141.000
459	Kab. Manggarai Timur	286.150.561.000
460	Kab. Sabu Raijua	195.911.747.000
461	Provinsi Maluku	703.993.953.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	318.329.722.000
463	Kab. Maluku Tengah	549.558.383.000
464	Kab. Maluku Tenggara	254.149.048.000
465	Kab. Buru	274.961.724.000
466	Kota Ambon	411.355.104.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	323.727.809.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	262.855.512.000
469	Kab. Kepulauan Aru	302.931.395.000
470	Kab. Maluku Barat Daya	302.514.663.000
471	Kota Tual	196.885.900.000
472	Kab. Buru Selatan	222.107.273.000
473	Provinsi Maluku Utara	540.389.811.000
474	Kab. Halmahera Tengah	255.879.015.000
475	Kab. Halmahera Barat	263.223.050.000
476	Kota Ternate	314.020.637.000
477	Kab. Halmahera Timur	242.818.772.000
478	Kota Tidore Kepulauan	313.516.331.000
479	Kab. Kepulauan Sula	296.452.813.000
480	Kab. Halmahera Selatan	364.163.238.000
481	Kab. Halmahera Utara	290.478.880.000
482	Kab. Pulau Morotai	203.956.615.000

483 Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 18 ~

NO	DAERAH	JUMLAH
483	Provinsi Papua	1.276.285.908.000
484	Kab. Biak Numfor	363.097.861.000
485	Kab. Jayapura	410.483.253.000
486	Kab. Jayawijaya	408.441.790.000
487	Kab. Merauke	754.829.983.000
488	Kab. Mimika	316.335.501.000
489	Kab. Nabire	428.579.722.000
490	Kab. Paniai	384.779.134.000
491	Kab. Puncak Jaya	413.704.652.000
492	Kab. Kepulauan Yapen	304.815.361.000
493	Kota Jayapura	392.664.839.000
494	Kab. Sarmi	430.994.888.000
495	Kab. Keerom	329.653.119.000
496	Kab. Yahukimo	428.267.102.000
497	Kab. Pegunungan Bintang	494.685.364.000
498	Kab. Tolikara	378.438.060.000
499	Kab. Boven Digoel	531.912.344.000
500	Kab. Mappi	499.129.572.000
501	Kab. Asmat	589.993.333.000
502	Kab. Waropen	316.615.827.000
503	Kab. Supiori	275.955.292.000
504	Kab. Mamberamo Raya	438.951.482.000
505	Kab. Mamberamo Tengah	291.037.176.000
506	Kab. Yalimo	299.082.295.000
507	Kab. Lanny Jaya	323.394.599.000
508	Kab. Nduga	350.094.019.000
509	Kab. Dogiyai	280.084.219.000
510	Kab. Puncak	460.452.765.000
511	Kab. Intan Jaya	419.415.561.000
512	Kab. Deiyai	322.332.648.000

513 **Provinsi ...**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	DAERAH	JUMLAH
513	Provinsi Papua Barat	700.444.910.000
514	Kab. Sorong	360.929.803.000
515	Kab. Manokwari	444.344.531.000
516	Kab. Fak Fak	404.103.587.000
517	Kota Sorong	269.780.833.000
518	Kab. Sorong Selatan	255.252.462.000
519	Kab. Raja Ampat	372.441.509.000
520	Kab. Teluk Bintuni	391.764.892.000
521	Kab. Teluk Wondama	270.181.889.000
522	Kab. Kaimana	392.068.119.000
523	Kab. Tambrauw	223.388.735.000
524	Kab. Maybrat	278.553.707.000
	Total Provinsi	22.553.282.482.500
	Total Kabupaten/ Kota	202.979.542.342.500
	Total Nasional	225.532.824.825.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perekonomian dan Industri
Sekretariat Kabinet,

ttd.

Ratih Nurdianti